

# POLICY BRIEF

2025

## KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PROBLEM GIZI

Penulis: Ali Khomsan



**Departemen Gizi Masyarakat  
Fakultas Ekologi Manusia  
IPB University**

## Dimensi Kemiskinan

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah hal yang sangat ditakuti oleh pekerja. Hilangnya pekerjaan ibarat kiamat kecil yang memporakporandakan kehidupan. Apalagi bila yang terkena PHK adalah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Ketentraman dan kebahagiaan keluarga langsung sirna manakala kepala keluarga yang sangat dibanggakan mengalami PHK.

Investasi di bidang industri menjadi peluang yang diharapkan para pencari kerja di tengah situasi ekonomi yang sulit. Terbukanya lapangan kerja akan menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga sektor informal pun akan menggeliat. Tujuan bernegara adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini terkait dengan rapor kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persoalan kemiskinan di Indonesia bukan pada data melainkan pada upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 menurut BPS tercatat sebesar Rp582.932/kapita/bulan dengan total penduduk miskin berjumlah 25,2 juta orang. Apabila digunakan standar Bank Dunia yang mendefinisikan orang miskin sebagai orang yang penghasilannya kurang dari 2 dolar per hari, maka jumlah orang miskin di negara kita akan lebih banyak.

Dimensi kemiskinan memang sangat luas menyangkut ketidakberdayaan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan perumahan. Suara-suara orang miskin adalah keluhan tentang kondisi rumahnya yang tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang buruk, asupan makanan tidak bergizi, pakaian seadanya, rendahnya daya beli, dan ketidakmampuan menyekolahkan anak.

Tanpa pertumbuhan industri, maka angka pengangguran yang mendorong terjadinya kemiskinan akan tetap tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS 2024) mencatat ada 7.465.599 pengangguran di Indonesia per Agustus 2024. Sejumlah 11,28% di antaranya atau 842.378 orang merupakan 'sarjana pengangguran' yaitu lulusan D4, S1, S2, dan S3. Persentase 'sarjana pengangguran' tahun 2024 meningkat dua kali lipat dari satu dekade yang lalu.

Kelangkaan lapangan kerja dan PHK akan mengunci masyarakat dalam kemiskinan material. Oleh sebab itu menyediakan kesempatan kerja dan mendorong investasi akan menjadi salah satu *exit strategy* mengatasi kemiskinan.

Pendidikan merupakan sarana untuk lolos dari kemiskinan di kemudian hari. Pendidikan yang cukup akan menjamin generasi mendatang dapat meraih nasib lebih baik daripada orang tuanya yang saat ini hidup berkubang kemiskinan.

Dunia yang kurang adil telah menyebabkan kemiskinan semakin sulit teratas. Kemiskinan menjadi persoalan dunia, bukan hanya persoalan bangsa Indonesia. Poverty and Shared Prosperity yang dikeluarkan Bank Dunia menyebutkan bahwa di tahun 2013 terdapat 10,7% dari populasi global berada dalam jurang kemiskinan. Tercatat 767 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Mereka mencukupi kebutuhannya dengan pengeluaran US\$ 1,90 per hari (World Bank 2016).

Jumlah orang miskin paling banyak berada di wilayah Sub-Sahara Afrika yaitu 388,7 juta orang diikuti Asia bagian Selatan 256,2 juta orang. Peringkat berikutnya adalah Asia bagian Timur dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibia. Kemiskinan rendah tercatat di Eropa dan Asia Tengah (World Bank 2016).

Kalau di negara kaya hanya 1 dari 100 balita yang tidak dapat melangsungkan hidupnya, di negara miskin 20 anak dari 100 balita mati sebelum menginjak usia lima tahun. Balita di negara miskin yang mengalami keadaan kurang gizi berjumlah 50%.

Kesejahteraan global dan perkembangan teknologi yang diraih umat manusia melaju sangat pesat pada seabad terakhir dibandingkan abad-abad sebelumnya. Namun pertumbuhan yang mencengangkan ini terdistribusi secara tidak adil. Rata-rata penghasilan masyarakat di 20 negara terkaya adalah 37 kali lipat dibandingkan 20 negara termiskin.

## Strategi Pengentasan Kemiskinan

Evolusi program pengentasan kemiskinan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Pada tahun 1950an dan 1960an, investasi berupa pembangunan sarana fisik dan infrastruktur dianggap sebagai strategi jitu untuk melawan kemiskinan. Sekitar tahun 1970an barulah disadari bahwa investasi seperti itu tidak cukup, oleh sebab itu mulai diterapkan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan pendidikan dan kesehatan.

Indonesia perlu mengacu pada *trend* pengentasan kemiskinan yang mengedepankan pada tiga hal yaitu: *promoting opportunity*, *facilitating empowerment*, dan *enhancing security* (World Bank 2000). Yang dimaksud dengan *promoting opportunity* adalah memberi kesempatan pada orang miskin untuk mengakses pekerjaan, sarana transportasi, listrik, pasar, sekolah, air bersih, sanitasi,

dan kesehatan. Tentu saja kesempatan-kesempatan ini tidak akan terbuka bila tak ada pertumbuhan ekonomi.

Penyelewengan dan korupsi di negara kita bukan hanya menyakiti hati rakyat tetapi juga menyebabkan rakyat miskin makin terpuruk. Anggaran belanja negara menjadi kurang signifikan untuk pembangunan dan pembiayaan layanan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, banyak rakyat miskin yang masih menjerit menghadapi kehidupan yang kian sulit.

*Facilitating empowerment* adalah bagaimana mewujudkan harmoni antara proses-proses politik, ekonomi, dan kelembagaan-kelembagaan yang ada sehingga menjadi responsif terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat miskin. Pemberdayaan terhadap orang miskin, golongan menengah, dan kelompok lainnya akan menciptakan perubahan nyata dalam pelayanan publik sehingga layanan menjadi lebih efisien.

Memberdayakan perempuan secara langsung ataupun tidak akan membuka kesempatan ekonomi bagi orang miskin. Perempuan adalah pilar ekonomi kedua dalam rumah tangga. Ketahanan pangan keluarga akan menjadi lebih baik bila perempuan ikut bekerja mencari nafkah. Penghasilan perempuan dalam rumah tangga miskin cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan anak-anaknya.

*Enhancing security* adalah mengurangi tingkat kerawanan akibat ketidakstabilan ekonomi, bencana alam, kesakitan, dan berbagai tindak kekerasan. Ini akan menjadi pendorong terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Turbulensi ekonomi dunia pasti akan berdampak juga bagi orang miskin. Tanpa strategi ekonomi yang memadai, maka orang miskin akan semakin menderita akibat gejolak pasar dunia. Di bawah tekanan-tekanan ekonomi yang terjadi, orang miskin harus tetap mendapat garansi untuk mengakses berbagai layanan yang menjadi haknya.

Pada dasarnya masyarakat di mana pun di dunia ini sangat takut menghadapi kemiskinan. Kemiskinan adalah sesuatu yang dibenci, tetapi sulit untuk dienyahkan. Kita semua berharap kemiskinan di Indonesia segera dapat diatasi dengan mengimplementasikan program-program yang handal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Kesejahteraan dan Problem Gizi

Gambaran global menunjukkan bahwa negara-negara maju dan sejahtera di Eropa dan Amerika nyaris tidak menyumbangkan problem *stunting* (masalah gizi kronis) di tingkat dunia. WHO (2020) mengungkapkan bahwa negara-negara di Asia, yang umumnya masih banyak yang belum sejahtera, menyumbang 54% *stunting* di dunia, dan negara-negara Afrika berkontribusi 40%. Angka *stunting* rendah dijumpai di Singapura 2,8% dan Jepang 5,5%. Angka *stunting* yang rendah ada kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Diketahui bahwa PDB per kapita di tahun 2022 untuk Singapura adalah 82.794 dollar (US), Jepang 33.911 dollar, dan Indonesia 4.784 dollar. Produk domestik bruto adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. PDB menjadi indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara.

Yang telah diraih Singapura atau Jepang merupakan cermin bahwa keterbatasan sumber daya alam bukan menjadi kendala untuk mewujudkan negerinya menjadi negara sejahtera. Indonesia tentu berpeluang untuk menjadi negara maju yang konon akan terwujud di tahun 2045 nanti. Kuncinya adalah peningkatan mutu SDM harus menjadi fokus pembangunan di masa datang. Dengan memiliki SDM yang berkualitas dan kepemilikan sumber daya alam yang melimpah Indonesia diharapkan bisa melakukan lompatan menuju negara maju dan sejahtera.

Untuk memecahkan problem *stunting* pemerintah perlu meningkatkan kualitas program gizi yang selama ini telah dilakukan. Program gizi di hulu untuk mengatasi problem *stunting* adalah pemberian tablet tambah darah (TTD) seminggu sekali untuk remaja putri di SMP-SMA. Anemia akibat kurang zat besi pada remaja putri hingga kini masih menjadi problem gizi yang sulit diatasi. Kurangnya asupan pangan hewani di kalangan masyarakat karena rendahnya kesejahteraan menjadi determinan anemia dan *stunting*. Apabila saat remaja mereka sudah mengalami anemia, maka pada periode selanjutnya yakni dewasa muda hingga memasuki jenjang pernikahan mereka akan senantiasa diintip problem gizi ini. Anemia di saat hamil mendatangkan risiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah dan *stunting*.

Kualitas SDM Indonesia benar-benar dipertaruhkan bila negara tidak mampu mengatasi *stunting*. Indikator kualitas SDM mencakup *capacity* (kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi), *deployment* (tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran), *development* (tingkat dan partisipasi pendidikan), dan *know-*

*how* (tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya). *Global Human Capital Report 2017* menempatkan Indonesia di peringkat ke-65 dalam hal kualitas SDM di 130 negara, masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga kita seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50) (WEF 2017). Menurunkan problem *stunting* menjadi salah satu *exit strategy* untuk mengungkit kualitas sumber daya manusia Indonesia.

## Rekomendasi

Kesejahteraan dapat diraih apabila seseorang memiliki atau dapat mengakses pekerjaan, memperoleh pendapatan yang layak, tercukupi kebutuhan akan pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dll. Kesehatan secara makro dicerminkan oleh angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan angka kematian ibu melahirkan. Sementara tercukupinya kebutuhan pangan diindikasikan oleh berkurangnya problem *stunting* (kurang gizi kronis), anemia, gizi buruk dll.

Pendidikan menjadi kunci penting untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Pemerintah harus membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk anak-anak usia sekolah melalui pendidikan gratis atau berbiaya murah. Masyarakat yang terdidik berpeluang untuk meraih pekerjaan yang lebih baik, sehingga mereka terhindar dari kemiskinan. Pendidikan akan membuat seluruh rakyat melek hurup, cerdas, dan kreatif, serta mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari manca negara. Sistem pendidikan harus membuka kesempatan bagi orang miskin untuk bersekolah setinggi-tingginya.

Indonesia perlu mengoptimalkan potensinya sebagai negara bahari, negara agraris, dan negara subur dengan kekayaan alam yang melimpah termasuk sumber daya pertambangan yang tersebar di berbagai pulau. Pemanfaatan aset sumber daya alam harus ditujukan untuk meraih kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Pemanfaatan sumber daya alam dari hulu sampai hilir harus berpihak kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan rakyat dapat segera diwujudkan.

## Daftar Pustaka

1. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. *Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.* Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
2. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen.* Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>
3. [WEF] World Economic Forum. 2017. *Global human capital report 2017.* World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017>
4. [WHO] World Health Organization. 2020. *Nutrition landscape information system (NLIS) country profile indicators: Interpretation guide.* World Health Organization.
5. World Bank. 2000. *World Bank policy and research bulletin* (Vol. 11, No. 4/Vol. 12, No. 1). Washington, DC: World Bank.  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/930061468766508495>
6. World Bank. 2016. *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality.* Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0958-3.  
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO